

TESIS

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK KEBEBASAN BERAGAMA
BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA**



**DESMAN V.E.N. SITOANG
NOMOR MAHASISWA : 135202002/PS/MIH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2017**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : DESMAN V.E.N SITO HANG
Nomor Mahasiswa : 135202002/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Kebebasan Beragama Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Nama Pembimbing

Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

Tanggal Tanda tangan

24-5-2017

16-5-2017



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : DESMAN V.E.N. SITO HANG
Nomor Mahasiswa : 135202002/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik
Kebebasan Beragama Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hak Asasi
Manusia

Nama Penguji

Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.
(Ketua)

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.
(Anggota)

Dr. G. Widiartana, S.H., M. Hum.
(Anggota)

Tanggal

4/7 - 2017

4/7 - 2017

4/7 '17

Tanda tangan



Ketua Program Studi

Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Penulis menyatakan bahwa Tesis dengan judul Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Kebebasan Beragama Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia merupakan hasil karya asli penulis. Penulisan Tesis ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Seluruh informasi dalam penulisan Tesis ini yang berasal dari penulis lain telah diberikan penghargaan dengan menyebutkan nama pengarang, judul buku, atau tulisan aslinya, dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 April 2017

Yang Menyatakan,

DESMAN V.E.N.S

ABSTRAK

Judul dari penulisan ini adalah kebijakan Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik kebebasan beragama berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dilihat dari sejarah hukum dan politik hukum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik kebebasan beragama berdasarkan hak asasi manusia, dan mengetahui dan mengkaji penyebab terjadinya konflik kebebasan beragama di Indonesia meskipun hal itu sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan juga melalui Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 18 ayat (1) dan (2). Pemerintah Indonesia juga menggunakan cara penyelesaian konflik kebebasan beragama melalui mediasi, sehingga asas kesetaraan dan non diskriminasi dapat diterapkan kepada semua pihak. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa Terjadinya konflik dalam kebebasan beragama disebabkan banyak masyarakat dan bahkan pemangku kepentingan dalam hal ini adalah penyelenggara pemerintahan setingkat desa yang belum paham kebebasan beragama yang secara formal dijamin oleh berbagai macam peraturan termasuk didalam konstitusi negara Republik Indonesia, sehingga terciptanya celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh sekelompok oknum yang menganut paham ekstrimisme dan fanatisme untuk melakukan tindakan radikal.

Kata kunci: Kebijakan, Konflik, Kebebasan Beragama, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

This study entitled the Indonesian Government Policy in Conflict Resolution Regarding the Freedom of Religion Based on Human Rights Principles. It is a normative legal study. Normative legal study is a legal study conducted by studying the literatures or secondary data. The approach used in this study is the legislative approach from the history and politics of law. The purpose of this study is to find out and study the Indonesian Government Policy in resolving the conflicts regarding the freedom of religion based on human rights principles, and to find out and study the causes of the conflict of freedom of religion in Indonesia although it has been stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and in International Covenant on Civil and Political Rights Article 18 paragraph (1) and (2). Indonesian Government also uses the conflict resolution on freedom of religion through mediation, so that the principles of Equality and Non-Discrimination can apply on all parties. The results of this study also showed that the conflict arises from the freedom of religion is due to the lack of understanding in many people and even the stakeholders, in this case the village-level government officials, regarding the freedom of religion which has been stipulated formally in some regulations including in the Constitution of the Republic of Indonesia, so that there is an opportunity exploited by the extremist and fanatic groups to perform radical actions.

Keywords: Policy, Conflict, Freedom of Religion, Human Rights

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang turut campur tangan melimpahkan berkat dan kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Kebebasan Beragama Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis banyak memperoleh bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan tesis. Bantuan berupa bimbingan, dukungan, masukan, saran, maupun doa, selalu menjadi semangat bagi Penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis. Dengan demikian, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, SH., LL. M selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang telah memberikan ilmu, waktu, tenaga dan pikiran dalam proses Penulisan Tesis yang sangat berharga bagi penulis.
2. Bapak Drs. M. Parnawa P, M.B.A., Ph.D selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Ibu Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan, masukan, saran dan ilmu yang sangat berharga bagi Penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya selama Penulis menempuh proses perkuliahan di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Orangtua penulis yang tercinta yaitu R.Z. Edward Sitohang dan R. Uli Simamora, yang selalu memberikan doa, cinta, dan kasih sayangnya kepada Penulis.
7. Abang penulis yaitu Abang Zerrys C Sitohang dan adik penulis Ivanna Nydya C Sitohang, S. T., yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada Penulis.
8. Pacar penulis yang tercinta Lika Agustin, S. H yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat tanpa hentinya kepada penulis.
9. Oma Vietje Vidha Hasani dan Opa Johannes atas dukungan semangat, doa, kepada penulis, terima kasih oma dan opa.
10. Sahabat penulis Hezron Robinson Siahaan dan Istri yang mendukung penulis, terima kasih broo.
11. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan September 2013.
12. Teman-teman seperjuangan, Soleman Dairo Tamaela, S.H., M. Hum, Betho Deus Pangestu S.H., M. Hum, Yopi Susanto S.H., M. Hum, Heribertus Apriadi S.H.,

M.Hum, Benny Sentosa Djinal S.H., M. Hum., yang selalu memberikan dukungan dan semangat bagi Penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis.

13. Semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 10 April 2017

DESMAN V.E.N.S



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah dan Batasan Konsep	7
D. Keaslian Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	18
F. Tujuan Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	20
 BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Kebebasan Beragama	22
1. Pengertian Kebijakan	22
2. Jenis Kebijakan	28
3. Kebebasan Beragama di Indonesia	32
4. Dasar Hukum Kebebasan Beragama	33
B. Penyelesaian Konflik Kebebasan Beragama.....	35
1. Pengertian Penyelesaian Konflik secara umum	35
2. Pengertian Konflik Kebebasan Beragama	36
3. Bentuk Penyelesaian Konflik.....	37
C. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia	38
1. Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	38
2. Pengertian Hak Asasi Manusia	40
3. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia	44
4. Pengaturan Kebebasan Beragama dalam Hak Asasi Manusia	47

	D. Landasan Teori.....	50
	1. Teori Negara Hukum	50
	2. Teori Hak Asasi Manusia.....	55
BAB III	METODE PENELITIAN.....	63
	A. Jenis Penelitian	63
	B. Pendekatan Penelitian	63
	C. Sumber Data	63
	D. Metode Pengumpulan Data.....	65
	E. Metode Analisis Data	66
	F. Proses Berfikir	69
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
	A. Gambaran Umum Konflik Kebebasan Beragama	70
	1. Fakta Empiris	70
	2. Fakta Normatif	75
	B. Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menyelesaikan Konflik Kebebasan Beragama Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia	76
	1. Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Kebebasan Beragama	76
	2. Konflik dan Penyelesaian Konflik	82
	a. Pengertian Konflik Secara Umum.....	82
	b. Penyelesaian Konflik.....	87
	3. Hak Asasi Manusia dalam Beragama	89
	C. Terjadinya Konflik Kebebasan Beragama di Indonesia, meskipun hal itu sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	91
	1. Konflik Kebebasan Beragama	91
	2. Penyelesaian Konflik Kebebasan Beragama	94
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	101
	A. Kesimpulan	101
	B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA